

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dengan melaksanakan otonomi daerah sebagai wujud dari desentralisasi.

Menurut Mardiasmo (2013) “pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Optimalisasi dalam penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi pendapatan asli daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian”.

Pendapatan asli daerah juga sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang digali oleh daerah tersebut. Oleh karena itu, terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat yaitu dengan melihat komposisi pendapatan asli daerah yang ada.

Apabila komposisi pendapatannya besar, maka tanggung jawab pemerintah daerah akan semakin besar juga dan apabila komposisi pendapatannya terhadap penerimaan daerah semakin kecil, maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin besar. Sedangkan ketika penerimaan pendapatan daerahnya meningkat, yang dirasakan masyarakat yaitu kelancaran pembangunan. Hal tersebut terjadi karena pendapatan asli daerah berperan sebagai sumber pendapatan yang digunakan untuk menunjang pembangunan di daerah seperti pembangunan infrastruktur, diantaranya pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan masih banyak fasilitas lainnya.

2.1.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah tentunya tidak berasal dari satu sumber saja melainkan dari berbagai sumber. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah (Riftiasari, 2019).

Pajak daerah merupakan iuran wajib kepada daerah terutang yang dipungut oleh pemerintah daerah yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada kas negara tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Hasil dari iuran tersebut dapat digunakan untuk membiayai keperluan daerah seperti pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah tersebut merupakan salah satu sumber bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk menjalankan program-program kerjanya.

a. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah menurut Siahaan (2013) dalam (Kesek, 2012) sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.

- 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- 6) Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Fungsi Pajak Daerah

Pajak daerah mempunyai peran penting dalam melaksanakan beberapa fungsi sama halnya dengan pajak pusat, antara lain fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*, yaitu:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul dan pajak disini juga sebagai sumber pembiayaan terbesar. Pemungutan pajak daerah dapat berguna untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan pembiayaan pembangunan daerah, seperti belanja pegawai, pemeliharaan dan sebagai tabungan Pemerintah Daerah. Hal tersebut tercermin dari kehendak memperoleh penerimaan pajak daerah dalam jumlah yang besar dengan biaya pemungutan yang sekecil-kecilnya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Untuk mencapai tujuan tertentu, fungsi mengatur oleh pemerintah dijadikan sebagai alat agar tujuan tersebut bisa tercapai. Di samping sebagai kegunaan untuk kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan jika perlu mengubah susunan pendapatan dari kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi ini juga disebut sebagai fungsi tambahan, karena

fungsi *regulerend* hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*.

c. Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Jenis dan tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. Menurut Mardiasmo (2013:13) dalam (Kesek, 2012) terdapat jenis-jenis pajak untuk provinsi dan kabupaten/kota yaitu:

- 1) Jenis dan Tarif Pajak Provinsi adalah sebagai berikut:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen);
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen).
- 2) Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut:
 - a) Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
 - b) Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
 - c) Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
 - d) Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
 - e) Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
 - g) Pajak Parkir 30% (tiga puluh persen)

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang peranannya cukup besar. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah yang digunakan sebagai pembayaran atas jasa atau dalam pemberian izin tertentu yang disediakan/diberikan khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Atau lebih sederhananya, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang atas dasar orang tersebut dapat menikmati jasa pemerintah daerah secara langsung karena fasilitas-fasilitasnya yang telah disediakan.

Retribusi daerah mencakup tiga kelompok yang bisa dimanfaatkan pemerintah agar bisa masuk ke dalam khas negara sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni :

1) Retribusi Jasa Umum

Merupakan pelayanan yang telah disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan dan lain-lain

2) Retribusi Jasa Usaha

Merupakan pelayanan yang bersifat komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah,

retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi tempat penginapan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pelayanan kepelabuhan dan lain-lain

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan pungutan atas pelayanan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas lainnya guna untuk menjaga kelestarian alam dan melindungi kepentingan umum. Tarif yang dibayarkan bersifat fleksibel sesuai dengan tujuannya, semakin kecil pengelolaan pelayanan publik suatu daerah, maka semakin kecil pula tarif retribusi yang dikenakan atau dibayarkan. Meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin usaha perikanan dan lain-lain.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan keuntungan atau laba bersih suatu perusahaan daerah bagi perusahaan milik daerah baik dari kekayaan daerah maupun modal yang sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Komponen kekayaan daerah tersebut pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang seluruh modal/sahamnya dimiliki oleh suatu daerah. Hasil pengelolaan kekayaannya bersumber dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara atau BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam jenis pajak, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kemudian dirinci menurut objek pendapatan antara lain :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Angsuran
- d. Pendapatan bunga
- e. Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- f. Potongan, komisi atau bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan atau dari pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

2.1.2 Pariwisata

2.1.2.1 Pengertian Pariwisata

Pariwisata sebagai fenomena global, telah menjadi suatu kebutuhan dasar yang melibatkan ratusan juta manusia. Sebagai kebutuhan dasar, sudah sepantasnya berwisata menjadi bagian dari hak asasi manusia, yang harus dihormati serta dilindungi. Hal inilah yang akhirnya membuat berbagai organisasi internasional

seperti PBB, Bank Dunia dan World Tourism Organization (WTO), mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi (Ohtaki et al., 1977).

Menurut Cooper (1993) dalam (Soedarso, Muchammad Nurif, 2014) pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan dimaksud bersifat sementara (1 hari, 1 minggu, 1 bulan) dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula. Jadi ada dua elemen penting yaitu perjalanannya itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuan dengan berbagai aktivitas wisatanya.

Dalam pembangunan pariwisata terdapat aspek besar yaitu dari aspek ekonomi, dari aspek ekonomi tersebut pariwisata dikatakan sebagai suatu industri. Dimana pengertian industri dalam ilmu ekonomi adalah sekelompok perusahaan yang sejenis memproduksi dan menghasilkan produk tertentu. Perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang mengelola potensi wisata dengan berbagai produk wisata. Pengertian produk dalam ilmu ekonomi adalah sesuatu yang dihasilkan melalui proses produksi, dimana penekanan utamanya di tujuan akhir dari suatu proses produksi dapat digunakan untuk berbagai tujuan guna memenuhi kebutuhan manusia (Rahmayani, 2021).

2.1.2.2 Jenis Pariwisata

1. Menurut Letak Geografis

a. Pariwisata Lokal (*local tourism*)

Pariwisata lokal merupakan jenis kepariwisataan yang ruang lingkungannya terbatas, lebih sempit dan terdapat dalam tempat-tempat tertentu saja. Seperti kepariwisataan kota Bandung, kota Denpasar, dan lain-lain

b. Pariwisata Regional (*regional tourism*)

Pariwisata regional merupakan jenis kepariwisataan yang dikembangkannya dalam suatu wilayah tertentu saja. Bisa dalam ruang lingkup nasional dan ruang lingkup internasional. Seperti, kepariwisataan Yogyakarta, Kepariwisataan Bali, dan lain-lain

c. Pariwisata Nasional (*national tourism*)

Pariwisata nasional merupakan jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, yang orang-orangnya bisa berasal dari warga negaranya maupun orang asing yang berdiam di negara tersebut

d. Pariwisata Internasional (*international tourism*)

Pariwisata internasional merupakan kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia.

2. Menurut Jenis Wisata

a. Wisata Budaya

Merupakan perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan berkunjung ke tempat lain atau ke

luar negeri serta mempelajari adat istiadat mereka, cara hidupnya dan budaya maupun seni nya

b. Wisata Kesehatan

Merupakan perjalanan dengan tujuan untuk meninggalkan keadaan lingkungan tempat sehari-harinya di tempat ia tinggal demi kepentingan jasmani dan rohani nya untuk beristirahat di tempat peristirahatan yang mereka kunjungi

c. Wisata Kuliner

Merupakan wisata yang semata-mata untuk memanjakan perut dengan aneka ragam masakan yang khas dari daerah tujuan wisata

d. Wisata Olahraga

Merupakan wisata yang memadukan kegiatan olahraga dengan kegiatan wisata, kegiatan dalam wisata ini berupa kegiatan olahraga yang aktif dan pasif. Yang mana mengharuskan para wisatawan melakukan gerakan olah tubuh secara langsung serta bisa menjadi penikmat dan menjadi pecinta olahraga saja

e. Wisata Komersial

Merupakan wisatawan yang mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran dagang, pameran industri dan lain-lain

f. Wisata Bahari (Maritim)

Merupakan wisatawan yang melakukan perjalanan berkaitan dengan olahraga air seperti air laut, pantai, danau

g. Wisata Industri

Merupakan perjalanan yang dilakukan oleh rombongan mahasiswa atau pelajar atau orang-orang awam ke suatu tempat perindustrian dengan tujuan untuk mengadakan sebuah penelitian

h. Wisata Bulan Madu

Merupakan perjalanan yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu ke suatu tempat dengan fasilitas-fasilitas khusus tersendiri demi kenikmatan sebuah perjalanan

i. Wisata Cagar Alam

Merupakan jenis wisata yang banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata tersebut ke tempat cagar alam, taman lindung, hutan daerah, pegunungan dan lain-lain yang kelestariannya dilindungi oleh Undang-Undang.

Jenis wisata dapat berkembang seiring berubahnya keinginan dan ketertarikan dari para wisatawan, hal tersebut dapat membuka bisnis pariwisata yang harus mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan yang telah diminati oleh wisatawan.

4.1.2.3 Komponen Pariwisata

Menurut (Zakiah, 2019) sistem pariwisata terdiri dari tujuh komponen besar, dimana komponen tersebut merupakan sektor utama dalam kepariwisataan yang memerlukan keterkaitan, ketergantungan, dan keterpaduan, yaitu:

1. Sektor Pemasaran (*The Market Sector*)

Mencakup semua unit pemasaran dalam industri pariwisata seperti kantor biro perjalanan dengan jaringan cabangnya, kantor promosi daerah tujuan wisata tertentu dan sebagainya

2. Sektor Perhubungan (*The Carrier Sector*)

Mencakup semua bentuk dan berbagai macam transportasi publik, khususnya yang beroperasi sepanjang jalur transit yang telah menghubungkan tempat berasalnya wisatawan ke tempat tujuan wisatawan. Seperti, perusahaan penerbangan (*airlines*), bus dan sebagainya

3. Sektor Akomodasi (*The Accommodation Sector*)

Umumnya sektor akomodasi ini berada di daerah tujuan wisata dan tempat transit, sebagai penyedia tempat tinggal sementara atau penginapan seperti penyedia makanan dan minuman.

4. Sektor Daya Tarik atau Atraksi Wisata (*The Attraction Sector*)

Sektor daya tarik ini sebagai penyedia daya tarik bagi wisatawan, dimana lokasinya terdapat di daerah tujuan wisata namun bisa juga terletak di daerah transit. Seperti, taman budaya, hiburan, peninggalan budaya dan sebagainya.

5. Sektor Tour Operator (*The Tour Operator Sector*)

Mencakup perusahaan penyelenggara dan penyedia paket wisata. Sektor ini membuat paket perjalanan dengan memilih dua atau lebih komponen dan memasarkannya dengan tingkat harga tertentu, dengan menyembunyikan harga masing-masing dari komponen paket tersebut.

6. Sektor Pendukung atau Rupa-Rupa (*The Miscellaneous Sector*)

Mencakup pendukung terselenggaranya kegiatan wisata, yang berada di sepanjang rute transit maupun di tempat tujuan wisata seperti toko oleh-oleh (*souvenir*), asuransi perjalanan wisata, travel cek (*traveller cheque*) dan sebagainya

7. Sektor Pengkoordinasi atau Regulator (*The Coordinating Sector*)

Mencakup peran pemerintah selaku regulator di bidang pariwisata dan penyelenggara pariwisata. Biasanya sektor ini menangani perencanaan dan fungsi manajerial untuk membuat system koordinasi antara seluruh sektor dalam sebuah industri pariwisata. Seperti, di tingkat lokal dan nasional yaitu Disparda, PHRI, Departemen Pariwisata dan sebagainya. Dan di tingkat regional seperti WTO, PATA dan sebagainya.

4.1.2.4 Pelaku Pariwisata

Menurut Fajriana (2019) dalam (Rahmayani, 2021) pelaku yang terlibat dalam wisatawan antara lain :

1. Wisatawan

Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka berdampak langsung pada kebutuhan wisata, yang dalam hal permintaan wisata.

2. Industri Pariwisata

Industri pariwisata artinya semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa bagi pariwisata yang telah dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu pertama: pelaku langsung yang merupakan usaha-usaha wisata yang menawarkan jasa secara langsung kepada wisatawan atau yang jasanya

langsung dibutuhkan oleh wisatawan. Kedua, pelaku tidak langsung ialah usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata.

3. Pendukung Jasa Wisata

Pendukung jasa wisata merupakan usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata itu termasuk di dalamnya adalah penyediaan jasa fotografi, jasa kecantikan, usaha bahan pangan, penjualan BBM, dan sebagainya.

4. Pemerintah

Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggungjawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata.

5. Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal terutama penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata, menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata, karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata.

6. Lembaga Swadaya Masyarakat

Banyak LSM, baik lokal, regional, maupun internasional yang melakukan kegiatan dikawasan wisata. Bahkan jauh sebelum pariwisata berkembang, organisasi non-pemerintah ini sudah melakukan aktivitasnya baik secara partikuler maupun bekerjasama dengan masyarakat.

2.1.3 Wisatawan

2.1.3.1 Pengertian Wisatawan

Pengertian wisatawan disampaikan oleh *World Tourism Organization* (WTO) yang menyebut bahwa wisatawan sebagai pelancong yang melakukan perjalanan pendek atau sementara. Menurut WTO, wisatawan disebut sebagai orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara lain dan menginap minimal 24 jam dan maksimal nya enam bulan tinggal di tempat yang dikunjungi sehingga hal tersebut bisa dikatakan sebagai pelancong.

Menurut Sugiama (2011) dalam (Rahmayani, 2021) wisatawan merupakan kelompok atau individu yang sedang melakukan perjalanan dan bermaksud untuk beristirahat, berbisnis, berobat atau melakukan kunjungan untuk perjalanan studi. Dalam melakukan perjalanannya, kelompok atau individu tersebut meninggalkan tempat tinggalnya dalam waktu yang sementara, maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai wisatawan.

2.1.3.2 Jenis dan Karakteristik Wisatawan

Cohen (1972) mengklasifikasikan wisatawan atas dasar tingkat familiarisasi dari daerah yang akan dikunjungi, serta tingkat pengorganisasian dari perjalanan wisatanya menjadi empat yaitu seperti :

1. *Drifter*, yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali belum diketahuinya, dan bepergian dalam jumlah kecil.
2. *Explorer*, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan dengan mengatur perjalanannya sendiri, dan tidak mau mengikuti jalan-jalan wisata yang sudah umum melainkan mencari hal yang tidak umum. Wisatawan seperti ini bersedia

memanfaatkan fasilitas dengan standar lokal dan tingkat interaksinya dengan masyarakat lokal juga tinggi.

3. *Individual mass tourists*, yaitu wisatawan yang menyerahkan pengetahuan perjalanannya kepada agen perjalanan, dan mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah terkenal.
4. *Organized mass tourists*, yaitu wisatawan yang hanya mau mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah dikenal, dengan fasilitas seperti yang dapat ditemuinya di tempat tinggalnya, dengan perjalanannya selalu dipandu oleh pemandu wisata.

2.1.3.3 Klasifikasi Wisatawan

Menurut (Yoeti, 1996), wisatawan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yakni :

1. Wisatawan Mancanegara

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), wisatawan mancanegara merupakan orang-orang yang mengunjungi suatu negara diluar negara tempat tinggalnya serta didorong oleh beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat tersebut dan lama kunjungannya tidak lebih dari 12 bulan.

2. Wisatawan Nusantara

Wisatawan nusantara menurut (*World Tourism Organization, 2004*) merupakan penduduk dalam suatu negara yang melakukan perjalanan ke suatu tempat di dalam wilayah negaranya sendiri, namun diluar tempat tinggalnya dalam sehari-sehari dalam jangka waktu sekurang-kurangnya satu malam dan tidak lebih

dari satu tahun, dengan tujuan bukan untuk mendapatkan penghasilan di tempat yang dikunjunginya tersebut.

2.1.4 Hotel

2.1.4.1 Pengertian Hotel

Hotel merupakan sebuah bangunan yang dirancang dan khusus disediakan bagi orang-orang untuk menginap atau sekedar istirahat serta dapat memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dan dipungut bayaran.

Menurut (Sulastiyono, 2004) hotel diartikan sebagai suatu perusahaan yang menyediakan pelayanan seperti makanan, minuman dan fasilitas kamar yang memadai untuk orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mereka mampu membayar dengan jumlah yang wajar dan sesuai dengan pelayanan yang diterima oleh pihak hotel dan tanpa adanya sebuah perjanjian khusus.

Sedangkan menurut Nyoman S. Pendar dalam (Widaraningsih, 2016) menyatakan bahwa di Indonesia, hotel bukanlah satu-satunya tempat menginap bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Menurutnya, masih ada tempat lain yang biasa digunakan sementara sebagai pengganti hotel meskipun kelengkapan peralatan dan pelayanannya tidak selengkap dan semewah di hotel yaitu seperti penginapan, apartemen, losmen, pangsanggrahan dan sebagainya.

2.1.4.2 Klasifikasi Hotel

1. Berdasarkan Lokasi

a. City Hotel

Merupakan hotel yang bertempat di perkotaan dan disebut juga sebagai transit hotel karena hotel ini biasanya digunakan oleh pelaku bisnis dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis yang disediakan oleh hotel tersebut.

Hotel ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berniat untuk tinggal dalam jangka waktu pendek.

b. Residential Hotel

Merupakan hotel yang berada di daerah pinggiran kota besar dan jauh dari keramaian kota dan diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin tinggal dalam jangka waktu yang lama karena terdapat fasilitas yang lengkap untuk keluarga.

c. Resort Hotel

Merupakan hotel yang tempatnya berada di daerah pegunungan (*mountain hotel*) atau berada di tepi pantai, tepi danau atau yang ada di tepi aliran sungai.

d. Motel atau Motor Hotel

Merupakan hotel yang berada di pinggiran atau di sepanjang jalan raya yang menghubungkan satu kota dengan kota besar lainnya dan diperuntukkan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan sebagai tempat istirahat sementara dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil pribadi, serta hotel ini menyediakan fasilitas garasi yang memadai.

2. Berdasarkan Kelas

a. Hotel Melati / *Guesthouse*

Merupakan jenis hotel yang tergolong dalam kategori hotel budget atau hotel dengan tingkat bintang yang lebih rendah. Hotel ini bersifat sederhana dan biasanya dimiliki oleh perorangan dan dikelola oleh sendiri atau dibantu dengan satu orang karyawan. Meskipun fasilitasnya lebih sederhana, hotel melati biasanya tetap memberikan pelayanan yang baik dan bersih.

b. Hotel Bintang Satu

Merupakan hotel yang tergolong kecil dan harga yang terjangkau karena jumlah kamar nya terbatas sekitar 15 kamar dan luas kamar berkisar 20 meter persegi.

c. Hotel Bintang Dua

Merupakan hotel yang terletak di lokasi yang mudah dicapai dengan bangunan yang terawat, bersih dan rapi serta tempatnya yang bebas dari polusi. Hotel ini dibangun dengan jumlah sekitar 20 kamar dengan luas kamar sekitar 22 meter persegi (kamar standar) dan sekitar 44 meter persegi (kamar *suite*).

d. Hotel Bintang Tiga

Merupakan hotel yang mempunyai jumlah kamar yang standar minimal 30 kamar. Hotel ini biasanya terletak di dekat jalan tol, pusat bisnis dan daerah perbelanjaan.

e. Hotel Bintang Empat

Merupakan hotel yang cukup berkelas karena memiliki bangunan yang cukup besar dan dekat dengan pusat perbelanjaan, restoran dan hiburan, selain itu juga dilengkapi dengan karyawannya yang berpendidikan dan lebih profesional dalam melayani tamu. Hotel ini memiliki jumlah kamar standar minimal 50 kamar.

f. Hotel Bintang Lima

Merupakan hotel termewah dari hotel lain, dengan berbagai fasilitas tambahan serta pelayanan multi Bahasa dan hotel ini memegang prinsip bahwa tamu adalah nomor satu sehingga pada saat tamu datang diberikan minuman selamat datang. Hotel ini memiliki jumlah kamar standar minimal 100 kamar.

2.1.5 Tingkat Hunian Hotel

Menurut Damardjati (2001) dalam (Rafif, 2017), tingkat hunian adalah presentase dari kamar-kamar hotel yang bisa terisi atau disewakan kepada tamu dibandingkan dengan jumlah seluruh kamar yang dapat disewakan diperhitungkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya perhari, perminggu, perbulan, pertahun dan sebagainya. Tingkat hunian kamar yang tinggi dari sebuah hotel akan memberikan keuntungan dan penghasilan yang tinggi bagi hotel tersebut. Hal ini dikarenakan kamar sebagai produk utama yang memberikan profit margin yang paling tinggi dibandingkan dengan produk-produk hotel lainnya seperti laundry, restoran, room service dan sebagainya. Pada dasarnya suatu industri wisata yang bergerak di bidang bisnis khususnya hotel terdapat istilah yang disebut dengan room occupancy yang berarti tingkat hunian kamar pada suatu hotel.

Menurut Multag dalam (Maharani, Suharno, 2020) tingkat hunian hotel penting bagi pendapatan yang diterima oleh daerah, karena hotel bagus dan strategis letaknya pada daerah wisata akan membuat wisatawan yang berwisata di daerah tersebut akan menginap lebih lama di hotel tersebut. Kamar hotel terjual banyak akan membuat tingkat hunian hotel tinggi akan membuat penerimaan pendapatan hotel bertambah. Oleh karena itu, penerimaan daerah melalui pajak yang dibayarkan hotel akan bertambah sehingga pendapatan yang diperoleh daerah akan bertambah pula.

Tingkat hunian hotel dianggap sangat penting umumnya bagi manajemen hotel dan khususnya untuk departemen penjualan. Apabila tingkat hunian berkurang dari kapasitas hotel yang tersedia, maka akan terjadi penipisan

pendapatan dan peluang penjualan pun hilang. Oleh karena itu, apabila kamar hotel yang disediakan terjual banyak tentunya tingkat hunian hotel pun meningkat sehingga menyebabkan pendapatan yang diterima pajak hotel akan meningkat pula.

- Perhitungan tingkat hunian hotel:

$$\frac{\text{Jumlah kamar terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$$

2.1.6 Teori Elastisitas

Menurut Rahardja (2004) dalam (Arifin, 2020), analisis elastisitas digunakan untuk mengukur berapa persen satu variabel akan berubah apabila satu variabel lain berubah satu persen. Angka elastisitas (koefisien elastisitas) adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu variabel tak bebas akan berubah, sebagai reaksi karena satu variabel lain yaitu variabel bebas, berubah satu persen.

Menurut Gujarati (2007) dalam (Arifin, 2020) teori elastisitas konstan cocok digunakan dalam permodelan dengan data penelitian yang berbentuk data panel. Teori elastisitas konstan merupakan teori yang model regresi liniernya berbentuk logaritma. Model logaritma akan mempermudah dalam menentukan besaran elastisitas, karena koefisien variabel bebas dalam model logaritma merupakan angka elastisitas.

Kriteria pengelompokan elastisitas:

1. Elastis (*elastic/relatively elastic*)

$E > 1$ artinya bersifat elastis apabila terjadi kenaikan jumlah wisatawan sebanyak 1% maka mengakibatkan penurunan pendapatan asli daerah sebanyak lebih dari 1%.

2. Elastis Sempurna (*perfect elastic*)

$E = \infty$ (tak terhingga) artinya bersifat elastis sempurna apabila terjadi kenaikan jumlah wisatawan sebanyak 1% maka elastisitas pendapatan asli daerah akan berubah senilai tak terbatas (∞).

3. Unit (*unitary elastic*)

$E = 1$ artinya bersifat unitary apabila terjadi kenaikan jumlah wisatawan sebanyak 1% maka terjadi penurunan pendapatan asli daerah sebanyak 1%.

4. Inelastis (*inelastic/relatively inelastic*)

$E < 1$ artinya bersifat inelastis apabila terjadi kenaikan jumlah wisatawan sebanyak 1% maka terjadi penurunan pendapatan asli daerah sebanyak kurang dari 1%.

5. Inelastis Sempurna (*perfect inelastic*)

$E = 0$ artinya bersifat inelastis sempurna apabila terjadi kenaikan jumlah wisatawan sebanyak 1% maka pendapatan asli daerah akan tetap atau tidak ada perubahan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012- 2018 (Pratiwi, 2019)	Independen: -Jumlah wisatawan Dependen: -PAD	Independen: -Jumlah hotel	Jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah hotel non bintang tidak berpengaruh terhadap PAD sedangkan jumlah wisatawan nusantara dan jumlah hotel bintang berpengaruh positif.	Jurnal Akuntansi Tahun 2019
2	Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Wisatawan Domestik, Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2001- 2012 (Amerta & Budhiasa, 2014)	Independen: -Kunjungan wisatawan mancanegara -Wisatawan domestik Dependen: -PAD	Independen: -Jumlah hotel dan akomodasi lainnya	Jumlah kunjungan mancanegara berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan jumlah kunjungan domestik dan jumlah hotel dan akomodasi lainnya berpengaruh negatif dan signifikan.	E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 3, No. 2, Februari 2014
3	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata dan Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali (Ayu et al., 2018)	Independen: -Jumlah kunjungan wisatawan Dependen: -PAD	Independen: -Jumlah objek wisata -Jumlah hotel	Jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata, dan jumlah hotel secara simultan berpengaruh signifikan, dan jumlah wisatawan, jumlah objek wisata dan jumlah hotel secara parsial berpengaruh positif dan signifikan.	E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 10 No. 1 Januari

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal, Tingkat Hunian, dan Jumlah Objek Wisata terhadap PAD Kabupaten Karangasem Tahun 1997-2016 (Sari & Yuliarimi, 2018)	Independen: -Kunjungan wisatawan -Tingkat hunian Dependen: -PAD	Independen: -Lama tinggal -Jumlah objek wisata	Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan lama tinggal wisatawan, tingkat hunian hotel dan jumlah objek wisata tidak berpengaruh positif dan signifikan.	E-Jurnal EP Unud, Vol. 7, No. 6 Juni 2018
5	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006- 2013 (Purwanti & Dewi, 2014)	Independen: -Jumlah kunjungan wisatawan Dependen: - PAD	Lokasi penelitian di Kabupaten Mojokerto	Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan	Jurnal Ilmiah Tahun 2014
6	Analisis Faktor Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Tingkat Penginapan Hotel terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata pada Industri Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2007-2018 (Marie & Widodo, 2020)	Independen: -Kunjungan wisatawan mancanegara -Tingkat penginapan hotel Dependen: -PAD	Lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sedangkan jumlah tingkat hunian penginapan hotel berpengaruh positif dan signifikan.	Jurnal Ilmiah Pariwisata, Vol. 25 No. 3 November 2020
7	Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado (Kapang et al., 2019)	Independen: -Tingkat hunian hotel -Jumlah wisatawan Dependen: - PAD	Independen: -PDRB	Tingkat hunian hotel dan jumlah wisatawan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD, sedangkan PDRB berpengaruh positif dan signifikan.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 19 No.04 Tahun 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Produk Domestik Regional Bruto Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Ani et al., 2018)	Independen: -Jumlah kunjungan wisatawan Dependen: -PAD	Independen: -PDRB	Jumlah kunjungan wisatawan domestik memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berpengaruh negatif dan tidak signifikan dan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki hubungan positif dan signifikan	Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarm an (JIEM); 3 (1), 2018
9	Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Tingkat Penghunian Kamar, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun (Tobing, 2021)	Independen: -Jumlah kunjungan wisata - Tingkat penghunian kamar Dependen: -PAD	Independen: -Jumlah obyek wisata	Jumlah obyek wisata, tingkat penghunian kamar, dan jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan tidak signifikan.	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 3. No.2 Nov 2021
10	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Yoga Suastika & Yasal, Mahendra, 2015)	Independen: -Jumlah wisatawan -Tingkat hunian hotel Dependen: -PAD	Independen: -Lama tinggal wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan lama tinggal wisatawan tidak berpengaruh. Jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.	E-Jurnal EP Unud, 6 [7] : 1332-1363

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Jumlah Tingkat Hunian Kamar Hotel, dan Jumlah Kamar Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan dan Kota Denpasar Tahun 2001-2010 (Sastra Wijaya & Djayastra, 2014)	Independen: -Kunjungan wisatawan -Tingkat hunian hotel Dependen: -PAD	Independen: -Jumlah kamar motel	Pengaruh kunjungan wisatawan dan jumlah kamar hotel berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan jumlah tingkat hunian kamar hotel tidak signifikan.	E-Jurnal EP Unud Vol. 3, No. 11, Nov 2014
12	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukit Tinggi (Aninda, 2022)	Independen: -Jumlah kunjungan wisatawan -Tingkat hunian hotel Dependen: -PAD	Lokasi penelitian di Kota Bukit Tinggi	Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan, dan tingkat hunian hotel berpengaruh negatif dan signifikan.	Jurnal Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen, Vol. 2 No. 3 (2022)
13	Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata dan PHR terhadap PAD Kabupaten Gianyar (Pertwi, 2014)	Independen: -Kunjungan wisatawan Dependen: -PAD	Independen: -Retribusi obyek wisata -PHR	Secara parsial jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan, pendapatan retribusi obyek wisata berpengaruh positif dan signifikan, pajak hotel dan restoran berpengaruh positif dan signifikan. Secara bersama-sama jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan retribusi obyek wisata dan pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan.	E-Jurnal EP Unud, Vol. 3, No. 3, Maret 2014

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015	Independen: -Jumlah kunjungan wisatawan Dependen: -PAD	Independne: -Pendapatan pajak hotel, restoran -Pendapatan retribusi obyek wisata	Kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan retribusi obyek wisata berpengaruh signifikan	E-Jurnal EP Unud, Vol. 5 No. 12, Desember 2016
	(Wijaya & Sudiana, 2016)				

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam melaksanakan penelitian disajikan kerangka berfikir untuk mempermudah penulis menjelaskan hubungan antara jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan nusantara dan tingkat hunian hotel terhadap pendapatan asli daerah.

2.3.1 Hubungan Jumlah Wisatawan Mancanegara dengan Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Qadarrochman, 2010), orang yang datang dari luar negeri yang disebut dengan wisatawan mancanegara, ia menyatakan bahwa kedatangan wisatawan dari luar negeri akan mendatangkan devisa bagi negara yang dikunjunginya. Selain itu, dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tentunya akan meningkatkan sumber pendapatan daerah dan juga akan memberikan dampak yang positif bagi Daerah Kunjungan Wisata (DTW). Hal itu karena setiap wisatawan yang datang pastinya akan mengunjungi tempat pariwisata dan tentunya dengan membayar biaya retribusi yang telah ditetapkan oleh masing-

masing objek wisata yang mereka kunjungi, sehingga semakin tinggi arus kunjungan wisatawan maka pendapatan sektor pariwisata pun akan meningkat.

Wisatawan mancanegara selama melakukan perjalanan wisata akan menimbulkan gejala konsumtif dimana nilai tukar mata uang asing yang dibawa akan menambah pada pendapatan asli daerah. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Amerta & Budhiasa (2014) dimana variabel kunjungan wisatawan mancanegara berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2.3.2 Hubungan Jumlah Wisatawan Nusantara dengan Pendapatan Asli Daerah

Banyaknya jumlah wisatawan nusantara dibandingkan dengan jumlah wisatawan mancanegara, tentunya akan meningkatkan pendapatan sektor pariwisata karena tempat wisata yang mereka kunjungi masih berada di dalam negaranya sendiri sehingga memudahkan para wisatawan ketika ingin berkunjung ke suatu daerah. Berbagai kebutuhan wisatawan selama melakukan perjalanannya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk yang ada di daerah tujuan wisata tersebut. Dengan adanya kegiatan konsumtif, maka wisatawan nusantara akan menambah pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisatanya.

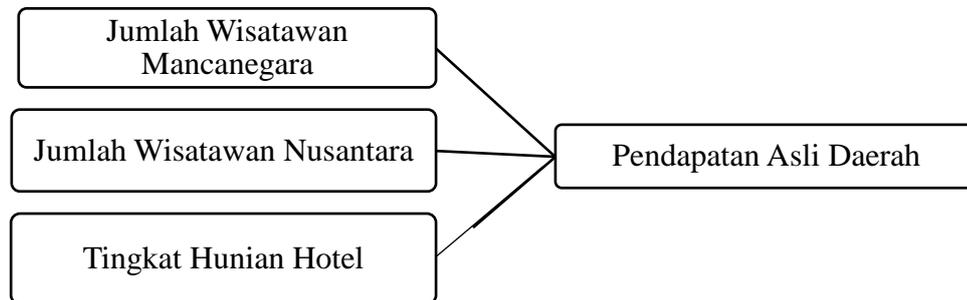
Semakin tingginya arus kunjungan wisata suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW), maka pemerintah daerah dapat melakukan promosi mengenai pariwisata yang ada di daerahnya guna meningkatkan daya tarik para wisatawan. Oleh karena itu, semakin lama wisatawan tinggal di suatu tempat tujuan wisata tersebut maka berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan

menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata (Zulmi, 2018). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Pratiwi (2019), dimana variabel jumlah wisatawan nusantara berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2.3.3 Hubungan Tingkat Hunian Hotel dengan Pendapatan Asli Daerah

Saat ini, hotel memiliki fungsi bukan hanya untuk menginap saja namun juga bisa dijadikan tempat untuk bekerja seperti kegiatan bisnis ataupun seminar. Tersedianya hotel yang memadai dengan banyaknya jenis hotel dan dengan harga yang tersedia mulai dari yang murah hingga mahal, tentunya akan meringankan para wisatawan untuk menginap di hotel yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam membayarnya. Sehingga, para wisatawan akan merasa nyaman untuk tinggal lebih lama sehingga tingkat penghunian hotel akan meningkat dan begitu pula akan meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui pajak hotel, pajak penghasilan dan pajak restoran. Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari & Yuliarmi (2018) dimana variabel tingkat hunian hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai hubungan antara jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan nusantara dan tingkat hunian hotel terhadap pendapatan asli daerah, dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut (Supranto, 1997), hipotesis merupakan pendapat sementara dalam penelitian yang disusun berdasarkan teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang akan menghubungkan dua variabel atau lebih. Berdasarkan dasar pemikiran yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Diduga secara parsial jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan nusantara dan tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2021.
2. Diduga secara bersama-sama jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan nusantara dan tingkat hunian hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2021.